

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
12	SUARA KARYA	12	2-8-2002

Rakyat Sangatta Diintervensi Dari Luar

## KPC Didemo, Aktivitas Tetap Jalan

**BALIKPAPAN (Suara Karya):** Rapat pleno DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar secara maraton Rabu malam hingga pukul 22.45 Wita, membuah ketetapan Nomor 16/2002. Isi ketetapan tertanggal 31 Juli 2002 itu, menolak keputusan pemerintah pusat yang memberikan 20 persen divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk pemerintah pusat, dan 31 persen untuk Kaltim.

Ketetapan itu juga mendesak kepada Presiden Megawati agar memecat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Karena, keputusannya tidak sesuai dengan perundingan yang dilaksanakan sebelumnya di Jakarta. Namun perusahaan penghasil batubara terbesar di Indonesia itu tetap melakukan operasi seperti biasa.

Sejak dua hari ini (Rabu dan Kamis-red), PT KPC yang berpusat di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dilanda demo. Para demonstran yang berjumlah sekitar 750 orang itu berasal dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim untuk Keadilan dan Kesejahteraan (AMK3).

Mereka sebagian besar berasal dari masyarakat luar Sangatta, yakni dari Samarinda dan Bontang. Sedangkan dari Sangatta sendiri tak lebih dari 100 orang dari kelompok Alpera yang diketuai oleh Rivadin.

Mereka menuntut agar PT KPC melepaskan sahamnya sesuai keinginan Pemprov Kaltim sebesar 51 persen, bukan 31 persen. AMK3 menghendaki selama masa proses penyelesaian divestasi saham belum mencapai titik temu, eksploitasi kegiatan pertambangan dinyatakan "status-quo" dan segala risiko akibatnya ditanggung pihak perusahaan.

### Tetap Kondusif

Menurut Kepala Kantor PT KPC Balikpapan, Hasrul Sani, kondisi terakhir di Sangatta (KPC) tetap kondusif, meski pengunjung rasa masih ada yang bertahan tetapi petugas keamanan tetap persuasif.

"Meski petugas Polri dan TNI dimobilisasi ke daerah Sangatta, tetapi kondisi perusahaan dan pertambangan tetap aman terkendali. Namun tidak tertutup kemungkinan pihak perusahaan akan menurunkan pasukan keamanan dari Mabes Brimob Pusat, yakni pasukan Kelapa Dua," ujar Hasrul Sani kepada pers di Balikpapan, Kamis (1/8).

Hasrul mengatakan, kalau Pemprov Kaltim tetap ngotot dengan kehendaknya mendapatkan 51

persen saham, maka itu akan membuat daerah Kaltim bakal tidak aman sampai kapan pun juga. "Dengan tidak disetujuinya keputusan pemerintah pusat, atau dengan kata lain Pemprov Kaltim tetap ngotot 51 persen, dipastikan daerah ini akan tetap bergolak dan titik temu divestasi bakal sulit," urainya.

Para pengunjung rasa memang masih ada yang bertahan di Sangatta, tapi mereka tetap bersikap wajar di mana pihak keamanan dari Polri dan TNI tetap bersikap persuasif. "Kami tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, karena permasalahan divestasi saham ini beda dengan kasus gejolak karyawan beberapa waktu lalu," kata sejumlah karyawan KPC.

Kapolda Kaltim, SY Wenas, menandakan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang lebih tegas jika para pengunjung rasa ada yang melakukan tindakan anarkis. Sebab, jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama, yang mengalami kerugian bukan saja pihak perusahaan KPC, tetapi juga masyarakat Kaltim.

### Merasa Diintervensi

Perkembangan terakhir di Sangatta sampai berita ini diturunkan, situasinya tetap aman dan terkendali. Polda Kaltim menurunkan tim pengaman terdiri tujuh peleton dari anggota Brimob, dua peleton anggota Perintis, dan tiga

peleton bantuan dari anggota TNI yang masih di-stand by-kan.

Beberapa tokoh-tokoh masyarakat Sangatta, Kutai Timur yang berhasil dihubungi, antara lain H Sakka, H Johansyah, Suwardi dan H Tidie, mengatakan, dengan adanya demo oleh masyarakat dari luar Kutim ini berarti masyarakat Kutim, khususnya Sangatta sudah mulai diintervensi, karena mereka berdemo yang bukan wilayahnya.

"Kami sebagai wakil dari masyarakat Sangatta, sangat tidak rela dijadikan ajang demo dari masyarakat luar, karena daerah kami menjadi tidak kondusif," tegas H Sakka yang didampingi, H Johansyah, Suwardi dan H Tidie.

Dengan kenyataan tersebut,

menurut rencana hari ini (Jumat 2/8), para tokoh masyarakat Sangatta akan menghadap kepada anggota DPRD Kutim untuk mempertanyakan sikap apa yang harus diambil oleh masyarakat Kutim terhadap intervensi tersebut.

Para tokoh itu menyatakan, pengalaman demo yang dilakukan para karyawan PT KPC beberapa waktu lalu, benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dengan tidak beroperasinya PT KPC, seluruh potensi perekonomian rakyat di Sangatta menjadi lumpuh, sehingga masyarakatlah yang akhirnya menderita.

Mereka berharap masalah divestasi ini biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat

Sangatta dan Kutai Timur pada umumnya, menginginkan agar pelaksanaan divestasi KPC berdampak menjadi lebih mensejahterakan rakyat, namun proses divestasi itu hendaknya jangan sampai berdampak melumpuh perekonomian rakyat.

Semua masyarakat Sangatta sadar bahwa, kehadiran PT KPC benar-benar menjadi harapan baru bagi warga di kabupaten yang baru berusia "seumur jagung" ini.

"Tanpa adanya perusahaan pertambangan batubara KPC di sini, maka Sangatta tidak bisa menjadi seperti sekarang. Bahkan, tidak mungkin akan ada Kabupaten Kutai Timur," kata H Johansyah dan Suwardi. (KH-2)